

Monthly Report

**Badan Pengarah Papua Provinsi
Papua Barat**

Januari 2025

Sekretariat Badan Pengarah Papua



Sumber : Tim Humas Poltekel Sorong

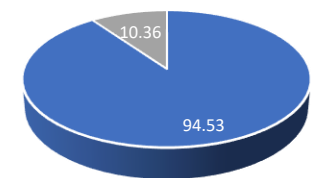


APBN Regional Papua Barat

- ❑ Pendapatan Negara mencapai **Rp 104,89 miliar**
- ❑ Belanja Negara mencapai **Rp 823,59 miliar**
- ❑ Defisit mencapai **(Rp 534,29 Triliun)**

- ❖ **Pajak Dalam Negeri** didominasi oleh PPH Nonmigas (PBB).
- ❖ **PNBP** terkontraksi karena adanya penurunan penerimaan PNBP lainnya sebesar 10,18%
- ❖ **Belanja K/L** didominasi operasional kantor (Belanja Barang).
- ❖ **Transfer Ke Daerah** didominasi oleh DAU *Block Grant* untuk belanja ASN Pemda

Pendapatan Negara Realisasi: 3,19 %

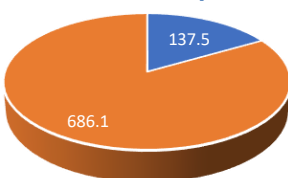


■ Pajak DN ■ PNBP

Pajak DN	94,53
Pajak LN	-
PNBP	10,36

dalam miliar rupiah

Belanja Negara Realisasi: 5,31%



■ Belanja KL ■ TKD

Belanja K/L	137,50
Transfer Ke Daerah (TKD)	686,10

Sumber: OMSPAN (diolah)



Indikator Percepatan Pembangunan Papua Barat dalam RIPPP 2024

PAPUA CERDAS

INDIKATOR	Baseline (2022)	Capaian (2024)	Target (2041)
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,21	13,17	14,59 -16,61
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	7,84	7,86	9,36 -10,37

PAPUA PRODUKTIF

INDIKATOR	Baseline	Capaian	Target
Tingkat Kemiskinan	21,33%	21,09%	5,81% -2,82 %
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,37%	4,13%	4,11 % -1,73%
Realisasi Investasi PMDN	Rp919,07 M	Rp 8.074,1 M	Rp92,3 -Rp174,5 Triliun

PAPUA SEHAT

INDIKATOR	Baseline	Capaian	Target
Umur Harapan Hidup (UHH)	66,46	68,47	68,66 -68,67
Tingkat Prevalensi Stunting	30,00	13,97%	<10 %
Indeks Pembangunan Manusia	65,89	67,47	N/A

Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)



Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan/Kendala	Rekomendasi
Masih terbatasnya penyediaan layanan kesehatan, jumlah tenaga kesehatan, sarana dan prasarana serta infrastruktur penunjang layanan kesehatan di Papua Barat khususnya di daerah terpencil	Perlu adanya peningkatan dan akselerasi penyediaan layanan kesehatan, persebaran tenaga medis secara merata dan percepatan pemenuhan infrastruktur dasar kesehatan
Tenaga dan kualitas pendidik yang belum merata dan maksimal di seluruh daerah	Percepatan Pendidikan guru 2 tahun melalui program RPL Kemendikbud no. 44 tahun 2023
Kendala geografis dan infrastruktur yang sangat terbatas, yang menghalangi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi	Peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Ego sentris suku atau etnis sangat kental sehingga mempengaruhi harmoni sosial, dan tidak menghendaki adanya suku atau etnis Papua lainnya untuk duduk dalam DPRK dan DPRP	Perlu membangun harmoni sosial antar suku atau etnis yang akan menjadi calon anggota DPRK dan DPRP agar mereka saling menghargai hak dan kewajiban dalam berdemokrasi



Kegiatan Strategis

PAPUA SEHAT



Pendaftaran Orang Asli Papua (OAP) 36.806 Orang sebagai penerima JKN TA 2024-2025

PAPUA CERDAS



Pelaksanaan fungsi SHEK terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Papua Barat

PAPUA PRODUKTIF



Audiensi dengan Dewan adat di Papua Barat

PAPUA POLHUKAM



Audience Bersama Stakeholders bidang demokrasi dan politik.

Indikator Pembangunan Papua Sehat

Umur Harapan
Hidup (UHH)

▲ **68,47**

Baseline (2022): 66,46
Target (2024): 66,52



Prevalensi Stunting

▲ **13,97%**

Baseline (2022): 30,00
Target (2024): 14,00



Eliminasi Malaria

0 Kab/Kota
Tahun 2023

Baseline (2022): N/A
Target (2024): N/A



Indeks Pembangunan
Manusia

▲ **67,47%**

Baseline (2022): 65,89
Target (2024): 66,81-67,04

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKKM,
Diskominfo PB, Profil Kesehatan Indonesia 2023 (diolah)

Kendala/Permasalahan

1. Masih diperlukan akselerasi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kepada OAP.
2. Terbatasnya jumlah tenaga Kesehatan sehingga persebaran di daerah tidak merata.
3. Masih diperlukannya penyediaan akses layanan Kesehatan yang mudah dan terjangkau
4. Tidak meratanya sarana dan prasarana akses kesehatan seperti apotek di setiap kabupaten.
5. Belum terdapat suatu sistem monitoring yang memantau program dan fokus prioritas layanan kesehatan

Rekomendasi

1. Diperlukan Kartu Papua Sehat Khusus bagi OAP
2. Penyediaan Fasilitas Kesehatan dan Implementasi Screening/deteksi dini dan penyembuhan dini penyakit menular dan penyakit tidak menular bagi Orang Asli Papua(OAP);
3. Pembangunan sarana Apotek Otonomi Khusus Bagi Orang Asli Papua (OAP) disetiap Kabupaten;
4. Memperkuat koordinasi antar lembaga dan stakeholder terkait;
5. Mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan mengimplementasikan anggaran tersebut ke program prioritas yang berdampak langsung kepada masyarakat;
6. Membentuk suatu sistem monitoring dan evaluasi untuk memperkuat implementasi program dan fokus prioritas pada peningkatan kualitas layanan yang dampak nyata bagi masyarakat.

Kegiatan Strategis



Pendaftaran Orang Asli Papua (OAP) 36.806
Orang sebagai penerima JKN TA 2024-2025



Pembahasan anggaran untuk pembangunan Gedung
Fasilitas Center layanan Jantung, Kanker, Stroke,
Hermodialisa di Manokwari sbg RS Rujukan



Pembuatan Kartu Sehat khusus bagi OAP untuk
mempermudah akses layanan kesehatan.

Indikator Pembangunan Papua Cerdas

Sumber Data: RIPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Harapan lama sekolah (HLS)
(tahun)

▲ **13,17**

Naik 0,01 tahun (yoy)

Baseline (2022): 13,21
Target (2024): 13,65

Rata-Rata Lama Sekolah
(RLS) (tahun)

▲ **7,86**

Naik 0,20 tahun (yoy)

Baseline (2022): 7,84
Target (2024): 8,00

Terjadinya kenaikan di sebabkan karena mulai di tumbuh kembangkannya kesadaran tentang pentingnya mutu Pendidikan dan adanya peran Pemerintah untuk menyiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang Pendidikan di setiap daerah.

Kendala/Permasalahan

1. Tenaga dan kualitas Pendidik yang belum merata dan maksimal;
2. kesulitan dalam mengakses layanan Pendidikan karena kurangnya sarpras pendidikan di setiap sekolah dan belum optimalnya layanan Pendidikan;
3. Rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa terutama OAP dengan baik.

Rekomendasi

1. Percepatan Pendidikan guru 2 tahun melalui program RPL Kemendikbud no. 44 tahun 2023.
2. Percepatan Penyediaan Layanan khusus sekolah sepanjang hari (SSH).
3. Penyediaan biaya Pendidikan bagi OAP yang merata di wilayah Papua Barat.
4. Percepatan penyediaan fasilitas sekolah unggulan di seluruh kabupaten di Provinsi Papua Barat
5. Percepatan pendirian Akademi Komunitas di Papua Barat
6. Percepatan dukungan peningkatan fasilitas layanan Pendidikan tinggi swasta

Kegiatan Strategis



Penyamaan persepsi BPP dengan Forkopimda PB



Pelaksanaan fungsi SHEK terhadap program dan kegiatan Dinas Pendidikan Papua Barat



Pertemuan dengan penggiat pendidikan



Penyusunan rencana Strategi

Indikator Pembangunan Papua Produktif

Tingkat Kemiskinan

▼ **21,09 %**

Turun 0,57% terhadap Maret '24

Baseline (2022): 21,33
Target (2024): 19,03



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

▼ **4,13 %**

Turun 0,05% (yoy)

Baseline (2022): 5,37
Target (2024): 4,24-4,95



Realisasi Investasi (PMA & PMDN)

▲ **Rp 8.074,1**

miliar

Baseline (2021): Rp919,07M
Target (2024): Rp92,3 - Rp174,57



Sumber Data: RIPPP, BPS, Kemendagri, dan BKPM (diolah)

Kendala/Permasalahan

1. Masalah geografis dan infrastruktur yang sangat terbatas, yang menghalangi akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Sebagian besar wilayah Papua Barat yang terisolasi dengan kondisi topografi yang sulit memperburuk distribusi sumber daya dan pembangunan. Selain itu, ketimpangan sosial, rendahnya kualitas pendidikan, dan infrastruktur yang minim juga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
2. Faktor sosial dan budaya Masyarakat adat yang cenderung mempertahankan pola hidup tradisional seringkali mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan zaman dan lebih memilih cara hidup yang bergantung pada sumber daya alam setempat, yang tidak selalu mencukupi kebutuhan ekonomi yang lebih modern. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan serta keterampilan profesional juga menjadi tantangan besar.
3. Kebijakan pemerintah yang kurang tepat sasaran serta pendekatan pembangunan yang tidak disesuaikan dengan kebutuhan lokal turut memperburuk situasi. Program-program pembangunan yang tidak berkelanjutan dan kurang melibatkan masyarakat setempat dalam perencanaan sering kali hanya memberikan manfaat jangka pendek dan tidak memberdayakan masyarakat Papua untuk mencapai kemandirian ekonomi.

Rekomendasi

1. Perlu dilaksanakan program yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan individu, serta memberikan pelatihan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja sehingga mengatasi masalah kemiskinan
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat alhasil dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat kab/kota Provinsi Papua Barat.

Kegiatan Strategis



Rapat Pertemuan dengan Dewan Adat



Rapat koordinasi fungsi SHEK dengan Biro Otsus terkait Fordasi dan Kinerja PB



Pembahasan Usulan Renja Kelompok Kerja BPP



Penyampaian persepsi dengan Forkompinda PB

Indikator Pembangunan Papua Polhukam

Sumber: BPS Provinsi Papua (2023)

Indeks Demokrasi

65,55 %

Aspek Kebebasan

72,89 %

Aspek Kesenjangan

72,52 %

Aspek Lembaga
Demokrasi

49,96 %

Penyelesaian
Tindak Pidana

32,83%

Kendala/Permasalahan

1. Adanya Pertentangan Politik tentang Sistem Rekrutmen Anggota DPRK dan DPRP melalui Jalur DAP dan LMA
2. Ego sentris suku atau etnis sangat kental sehingga mempengaruhi harmoni sosial, dan tidak menghendaki adanya suku atau etnis Papua lainnya untuk duduk dalam DPRK dan DPRP;
3. Rendahnya kesadaran hukum (budaya hukum) dan demokrasi dalam perekrutmen anggota DPRK dan DPRP;
4. Masih ada intervensi Badan Intelijen Negara dalam proses demokrasi di Kabupaten tertentu terkait dengan sistem rekrutmen anggota DPRP;

Kegiatan Strategis

1



Audience Bersama Stakeholders
bidang demokrasi dan politik.

2



FUNGSI SHEK : Bersama Bidang
Teritorial KODIM,, BIMAS
POLRI, Intel Kejaksaan, dan
Kesbangpol.

3



PENYAMAAN PERSEPSI dengan KODIM,
Kepolisian, Kejaksaan dan Kesbangpol

Rekomendasi

1. Sosialisasi Sistem DPRK dan DPRP harus lebih berkualitas dan bermartabat.
2. Perlu pembentukan wawasan dan sikap patuh aturan hukum bagi setiap bakal calon anggota DPRK dan DPRP agar lebih siap dan paham sistem rekrutmen yang ideal.
3. Perlu membangun harmoni sosial antar suku atau etnis yang akan menjadi calon anggota DPRK dan DPRP agar mereka saling menghargai hak dan kewajiban dalam berdemokrasi.
4. Anggota Badan Intelijen Negara yang ditugaskan sebagai pemantau dan Intel dalam wilayah/teritorial hendaknya bersikap netral dan tidak boleh terlibat dalam proses demokrasi untuk mendukung oknum tertentu sebagai anggota DPRP

Revitalisasi Pasar Sanggeng

- Balai Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Papua Barat
- Realisasi Rp146,24 miliar (100,00%)
- BAST tanggal 30 November 2024, BAP tanggal 9 Desember 2024

Pembangunan Pasar Sanggeng Kabupaten Manokwari menerapkan standar *green building* yang dibangun tiga lantai.

- luas lahan pasar : 27.809 m²
- luas bangunan : 21.519 m²
- kapasitas los pedagang : 1.016 unit
- Kapasitas kios : 394 unit



Penataan Kawasan Area Publik Borarsi

- Balai Prasarana Permukiman Wilayah Papua Barat
- Realisasi Rp49,65 miliar (100,00%)
- BAST tanggal 19 Desember 2024, BAP tanggal 23 Desember 2024

- Penataan Kawasan Area Publik Borarsi menjadi pusat upacara pembukaan event skala nasional maupun internasional di Papua Barat, sekaligus mendukung kegiatan publik masyarakat Manokwari seperti olahraga, pariwisata, dan kegiatan kebudayaan.

- Pengembangan desain *landmark* ini memanfaatkan kawasan Lapangan Borarsi

- luas lahan : 24.940 m²
- luas bangunan : 4.903 m²



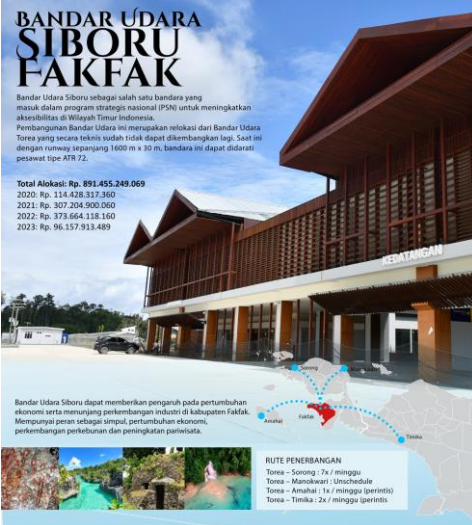
Bandar Udara Siboru



Bandar Udara Siboru (100%)
real Rp842 miliar (2020-2023)
Rp96,44 Miliar (2023)

Bandara Siboru

- runway 1.600 m x 30 m
- terminal 4.600 m² (menampung 153.945 penumpang per tahun)
- jembatan udara Papua Barat (menghubungkan Fakfak, Sorong, Timika, Kaimana, Amahai, Babo, Dobo, dan Bintuni.)



Realisasi PN 01 s.d. 07

Rp2,77 T*

(93,22%)
Pagu Rp2,97 T

Beberapa Capaian Output PN dengan Pagu Terbesar

PN	K/L	Rincian Output	Pagu	Realisasi	%
01	PUPR (033)	Pembangunan, Rehabilitasi dan Renovasi Sarana Prasarana Pasar (4971.RBB.012)	167.417.996.000	165.635.053.846	98,94
02	BPN (056)	Peta bidang tanah (PBT) Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) Desa/Kelurahan Lengkap Luar Jawa (6413.QAB.U27)	4.956.833.000	4.626.130.107	93,33
03	KLHK (029)	Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN) (6746.RBI.001)	52.405.606.000	42.822.450.973	81,71
04	Kemenag (025)	Penyuluh Agama Kristen Non PNS Penerima Tunjangan (2137.QDC.001)	9.636.000.000	9.612.933.600	99,76
05	PUPR (033)	Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) (2409.RBC.002)	240.616.697.000	240.616.697.000	100
06	KLHK (029)	Rehabilitasi Hutan dan Lahan secara Vegetatif (6736.REA.001)	8.305.576.000	7.869.416.507	94,75
07	Bawaslu RI (115)	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu (6661.QIC.001)	89.446.218.000	66.173.631.847	73,98



Terima Kasih